



WALIKOTA BUKITTINGGI

2020

Bukittinggi , Februari

Kepada Yth :
Sdr. Kepala SKPD se Kota
Bukittinggi
di
BUKITTINGGI

SURAT EDARAN

Nomor : 476.2/ 103 /DP3APPKB/ II /2020

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor. 050/57/II//Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kab/Kota se- Sumatera Barat Tahun 2020, dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bukittinggi diamanatkan untuk membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi yang diketuai oleh Kepala Bappelitbang dan Sekretaris yakni Kepala Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB).
3. Guna efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Kabupaten/Kota Tahun 2020 dengan menggunakan matrik Format 8 (delapan) kolom (F8K) sebagaimana terlampir pada surat edaran ini.
4. Substansi dan target Rencana Aksi sebagaimana point 3 tersebut diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh SKPD se Kota Bukittinggi tanpa terkecuali.



5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi bertanggungjawab secara penuh untuk :
 - a. memantau dan memastikan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksana Aksi RANDA PUG untuk melaksanakan Aksi sesuai dengan lampiran surat edaran ini.
 - b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Keduabelas (B12) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pelaksana Aksi, untuk memastikan kesesuaian laporan dan data dukung yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden.
6. Bappelitbang Kota Bukittinggi selaku pemegang *username* dan *password* pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada masa pelaporan B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Kedua belas) pada semua Aksi pada website : <https://serambi.ksp.go.id>, dengan periode waktu penyampaian pelaporan sebagai berikut :
 - a. Periode B03 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Maret 2020
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 April 2020
 - b. Periode B06 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Juni 2020
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Juli 2020
 - c. Periode B09 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 September 2020
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Oktober 2020
 - d. Periode B12 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Desember 2020
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Januari 2021
7. Badan Keuangan Daerah :
 1. Memantau RKA sudah memprogramkan Pengarusutamaan Gender pada masing masing SKPD
 2. Memastikan bahwa pada DPA SKPD sudah menganggarkan program yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender (PPRG).
8. Inspektorat
 1. Review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
 - Penyusunan instrumen review implementasi PPRG
 - Review terhdp implementasi PPRG periode Januari – Maret
 - Review terhdp implementasi PPRG periode April - Juni
 - Review terhdp implementasi PPRG periode Juli - Sept
 - Review terhdp implementasi PPRG periode Okt – Des
 2. Tersusunnya rekomendasi terkait implementasi PPRG yang disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan pada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi



1. Mendukung/ melaksanakan/ memasukkan program Pengarusutamaan Gender pada program/ kegiatan di SKPD
 2. Membuat GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Penyusunan RKA SKPD (Minimal 2 kegiatan di setiap SKPD).
 3. Mengaktifkan dan mamantau pelaksanaan tugas Focal Point PUG pada SKPD yang bersangkutan
-
10. Selain itu, Tim PPRG Kota Bukittinggi akan melakukan pemantauan untuk melihat kesesuaian laporan yang disampaikan dengan target yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah tercantum pada masing-masing RANDA PUG setelah dilaksanakannya verifikasi pada periode pelaporan sebagaimana point 6 diatas.
 11. Guna pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RANDA PUG, maka secara berkala akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Tim Penggerak PPRG Kota Bukittinggi pada periode sebelum dan setelah masa penyampaian dan verifikasi laporan.
 12. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan RANDA PUG Kota Bukittinggi untuk Tahun 2020 dapat menghubungi Bappeda Kota Bukittinggi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat selaku Sekretariat PPRG Kota Bukittinggi atau Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Bidang Pengarusutamaan Gender .

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, terimakasih.



Tembusan , disampaikan kepada Yth :

- Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)



RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Inventarisasi Kebijakan Kabupaten/Kota yang responsif gender yang ditetapkan dalam periode 2015 - 2019	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB SKPD	Terwujudnya harmonisasi dan kebijakan responsif gender yang terimplementasi dengan baik	Terinventarisasi ya serta terkumpulnya kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang responsif gender periode 2015-2019 yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah	B03 : Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019..		B03 : Scan rekapitulasi/daftar inventarisasi kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019
					B06: Dipublikasikannya kebijakan/regulasi Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019 ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota		B06: Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019 pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Bukittinggi	Dinas P3APPKB Dinas Kominfo	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang	B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)
					B06: 6. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan		B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala



				diketahui oleh seluruh stakeholder	<p>Kepala Daerah/ Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)</p> <p>7. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi</p>		<p>Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah.</p> <p>2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)</p>
					<p>B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>		<p>B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>
					<p>B12 : -</p>		<p>B12 : -</p>
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB Bagian Hukum	Tersediannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	<p>B03 :</p> <p>1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG</p> <p>2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah</p>		<p>B03 :</p> <p>1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG</p> <p>2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)</p>
					<p>B06: -</p>		<p>B06: -</p>
					<p>B09: -</p>		<p>B09: -</p>
					<p>B12 : -</p>		<p>B12 : -</p>



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender (bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilihan KDH dan WKDH serentak Tahun 2020)	Pemerintah Kota Bukittinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Bagian Hukum	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten/Kota yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Orientasi tentang RPJMD 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD		B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RPJMD
					B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan Rancangan RPJMD
					B09: Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis		B09: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah
					B12 : Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai		B12 : 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
					<p>salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan</p> <p>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis</p>		<p>Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam</p>
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Bukittinggi	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	<p>B03 :</p> <p>1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD</p> <p>2. Orientasi tentang RKPD.</p> <p>3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD</p> <p>4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD</p>		<p>B03 :</p> <p>1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD</p> <p>2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi</p> <p>3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD</p> <p>4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD</p>
					<p>B06:</p> <p>Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang memuat substansi :</p> <p>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan</p> <p>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran</p>		<p>B06:</p> <p>1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum</p> <p>2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
					<p>Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>		<p>pembangunan</p> <p>4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>
					<p>B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang memuat substansi :</p> <p>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan</p> <p>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan</p>		<p>B09:</p> <p>1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021</p> <p>2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum</p> <p>3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>6. Scan Bab VI. Kinerja</p>



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
					isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					B12 : -		B12 : -
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota dengan melibatkan SKPD, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Bukittinggi	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	B03 : 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada SKPD Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari SKPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada SKPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari SKPD Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB SKPD	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kota Bukittinggi	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> yang melibatkan SKPD,Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di di Kabupaten/Kota yang melibatkan SKPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3A PPKB	Terwujudnya Forum Koordinasi yang partisipatif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	B03: Permintaan nama/usulan personil untuk Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		B03: Scan surat permintaan nama/usulan personil untuk pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
					B06: 1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). 2. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		B06: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
					B09 : -		B09 : -
					B12: -		B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG	Pemerintah Kota Bukittinggi	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG
					B06: -		B06: -
					B09 : -		B09 : -
					B12: -		B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi
					B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)		B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya		B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya
					B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG		B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Bukittinggi	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari SKPD 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari SKPD 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website	B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website		B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
			perempuan dalam dokumen data daerah	daerah	Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota		disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota		B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul
					B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota		B09: 7. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 8. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap) 9. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget	Pemerintah Kota Bukittinggi	1. DP3APPKB 2. Badan Perencanaan Penelitian	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> SKPD		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> SK[PD Kabupaten/Kota Barat antara



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD		dan Pengembangan (B09) 3. Badan Keuangan (B12) 4. SKPD	daerah	Statement (GBS) pada RKA/ DPA SKPD pada website pemerintah daerah	<p>2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan :</p> <p>a. mengatasi kesejangan gender yang terjadi</p> <p>b. penugasan prioritas nasional/ global seperti pencapaian SDG's</p> <p>c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</p> <p>d. Dalam rangka pencapaian SPM</p> <p>e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD.</p> <p>f. inovasi Daerah</p>		<p>lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi</p> <p>2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi</p> <p>3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs</p> <p>4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</p> <p>5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM</p> <p>6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD</p> <p>7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah</p>
					<p>B06:</p> <p>1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota</p> <p>2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan</p>		<p>B06:</p> <p>1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG)</p> <p>2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala SKPD pada Rencana</p>



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
					SKPD Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/ Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning		Kegiatan SKPD Kabupaten/Kota 3. Scan link <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah 4. Print screen menu tanggung "kegiatan yang responsif gender" pada e-planning
					B09: 1. Dilampirkannya GBS SKPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tanggung pada e-planning yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS SKPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning (yang terdiri dari Nama Program, Indikator Kinerja Progam, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu), yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
					B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tanggung pada e-budgeting		B12: 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tanggung pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
					yang ditandatangani oleh Kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		Kabupaten/Kota 4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Bukittinggi	DP3APPKB	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/kota sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD triwulan I		B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan 2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke SKPD Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD triwulan II		B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke SKPD Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)
					B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD triwulan III		B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD triwulan I



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
							dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke SKPD Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)
					B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Kabupaten/Kota triwulan IV 2. Terusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah		B12: 1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Bukittinggi	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota	B03: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Januari – Maret 2020 B06: 1. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan		B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Januari – Maret 2020 B06: 9. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan, absensi,



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
					Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode April - Juni 2020		notulen dan dokumentasi. 10. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode April - Juni 2020
					B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Juli - September 2020		B09: 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota 2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Juli - September 2020
					B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Oktober - Desember 2020		B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Oktober - Desember 2020

Bukittinggi, 10 Februari 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI



M. RAMLAN NURMATIAS



